



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2025

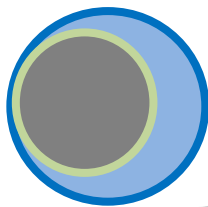


PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jln Jendral Ahmad Yani No. 17A Muara Enim

Telp/Fax: 0734 421194

www.pn.muaraenim.go.id



PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Tahun 2025.

Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk Tahun 2025 dan mempersiapkan diri memasuki tahun anggaran 2026. Selain itu laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan transparansi dari Pengadilan kepada Masyarakat.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

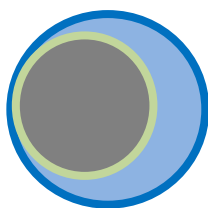
Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Muara Enim, 06 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



ARI OURNIWAN, SH.,MH
NIP. 19790711 200212 1 003

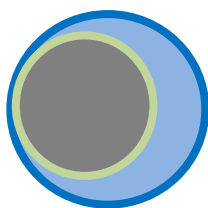




DAFTAR ISI

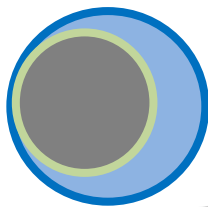
PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	14
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	15
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	16
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	16
B. PENYELESAIAN PERKARA	
- Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.....	17
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.....	17
- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.....	18
- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.....	18
- perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi..	19
- Perkara Perdata yang menggunakan e-Court.....	19
- Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	20
- Layanan perkara pidana ang diajukan secara elektronik (e-Berpadu.....	20
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	
- Posbakum (Satker yang mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran).....	21
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	22
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN	
- Mutasi	26
- Promosi	28
- Pensiun	28
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)	28





BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
A. Pengelolaan Keuangan	32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	33
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	60
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	60
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum.....	63
- Implementasi e-berpadu di lingkungan Peradilan Umum ..	65
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
- Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan tangguH (AMPUH.	67
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	69
- Inovasi Pelayanan Publik	85
BAB VI PENGAWASAN	
A. Internal	90
B. Evaluasi	94
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi.....	96





BAB I

PENDAHULUAN

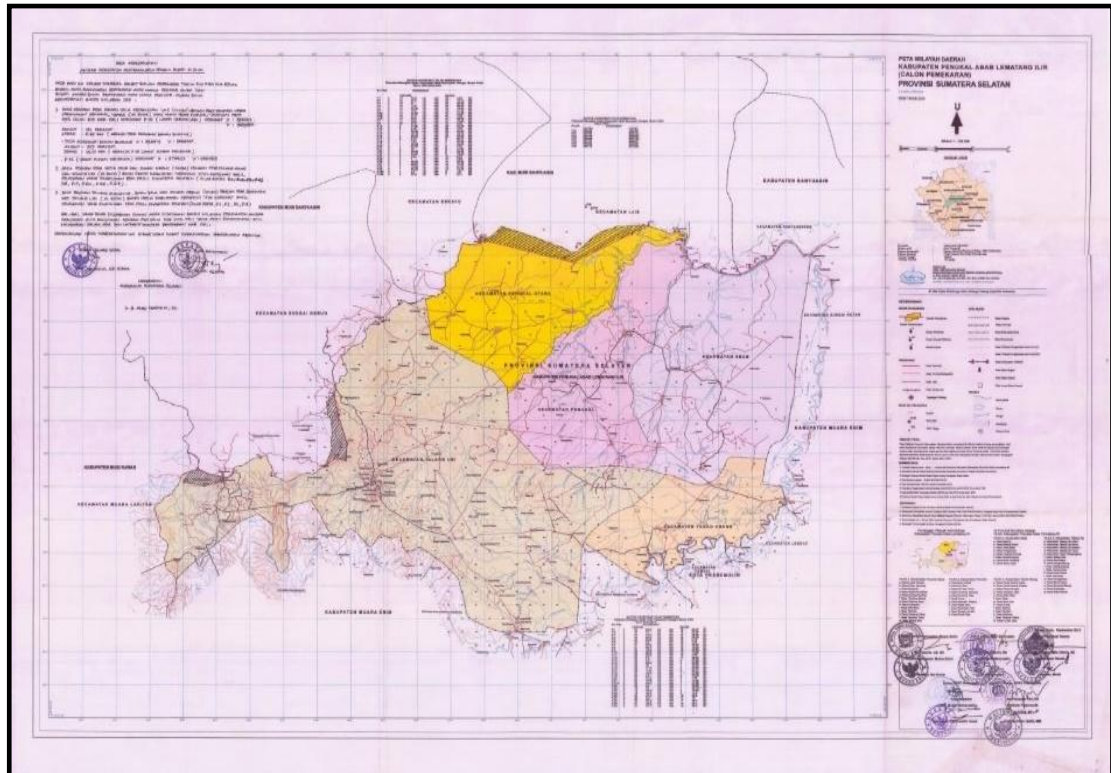
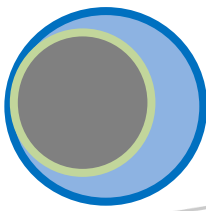
A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum.

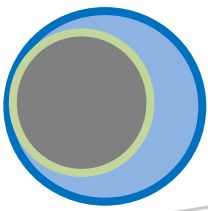
Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Kantor Pengadilan Muara Enim beralamat Jl. Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kec. Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Gedung Pengadilan Negeri Muara Enim diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Bapak Suroto, SH pada tanggal 19 Juli 1976. Wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim meliputi 2 (Dua) Kabupaten yaitu:

[illegible]



Peta lokasi wilayah Yuridiksi Kabupaten Muara Enim





TUGAS POKOK

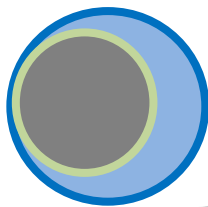
Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).

FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf- staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi





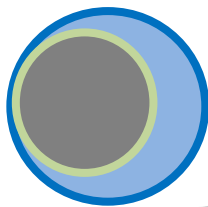
informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Muara Enim berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim resmi naik kelas, dari Type/ Kelas II menjadi Type/Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 771/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang pemberlakuan peningkatan kelas Pengadilan Negeri Muara Enim dari Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB. Pada tanggal 21 Juli 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Moh. Eka kartika EM, SH.,M.Hum meresmikan kenaikan type/kelas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Sejak berdirinya tahun 1976-2022, Pengadilan Negeri Muara Enim mempunyai 18 (Delapan Belas) orang Ketua Pengadilan, yang tercantum di bawah ini :





No	NAMA	MASA JABATAN
1.	ODJAK SOETISNA, SH	1978-1982
2.	SJAFEI HIDAJAT, SH	1982-1988
3.	MOHAMMAD HASBI, SH	1988-1989
4.	LEO LUHUT HUTAGULUNG, SH	1989-1991
5.	H. ACHJAR LUBIS, SH	1991-1996
6.	SULTONI MOHDALLY, SH	1996-1998
7.	H. UMAR HAMDAN	1998-2004
8.	H. HERRI SWANTORO, SH.,MH	2004-2006
9.	EKO TUNGGUL PRIBADI, SH	2006-2008
10.	H. AGUSTI, SH.,MH	2008-2009
11.	FIRMAN, SH	2009-2011
12.	KAMALUDIN, SH.,MH	2011-2014
13.	ABU HANIFAH, SH.,MH	2014-2016
14.	AS'AD RAHIM LUBIS, SH.,MH	2016-2019
15.	AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH	2019-2021
16.	ELVIN ADRIAN, SH., MH	2021-2024
17.	Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH	2024-2024
18.	ARI QURNIAWAN, SH, MH	2024-SEKARANG

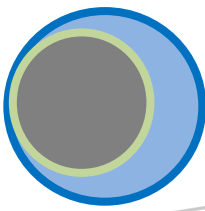
B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”





Misi Pengadilan Negeri Muara Enim :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :

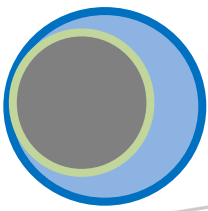
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



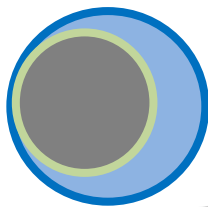


D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025, terdiri dari :

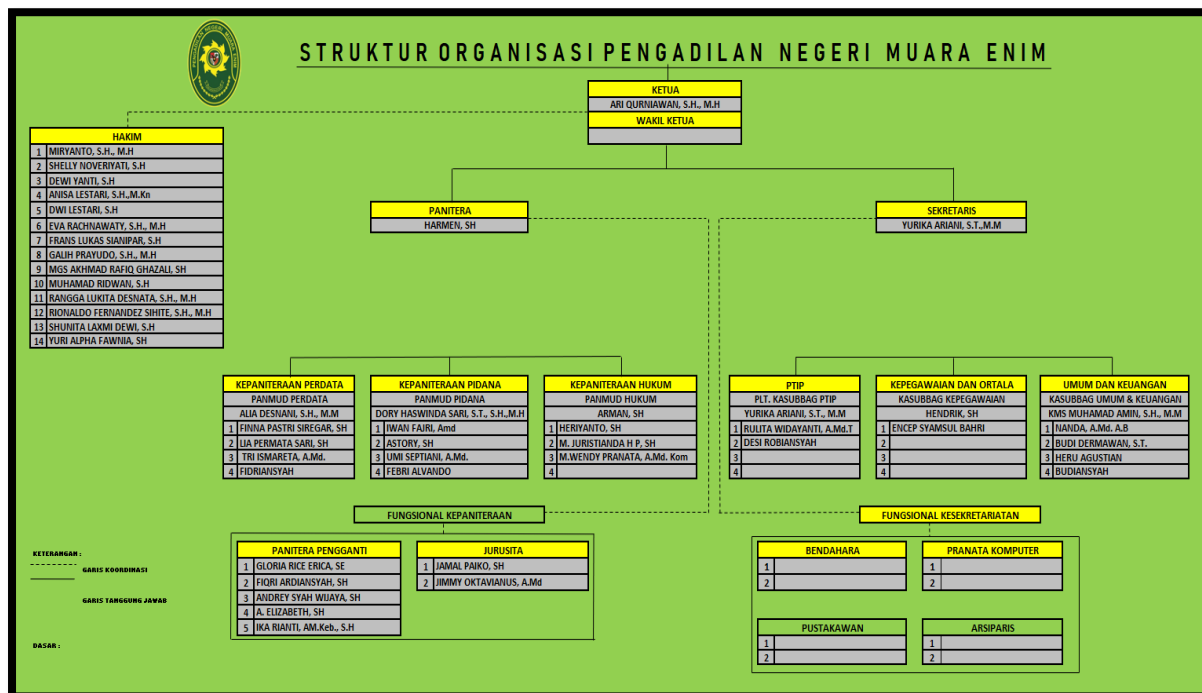
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Panitera Muda :
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Hukum
5. Kasubbag :
 - Kasubbag Umum dan Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
6. Fungsional Panitera Pengganti
7. Fungsional Jurusita
8. Fungsional Umum/Pelaksana

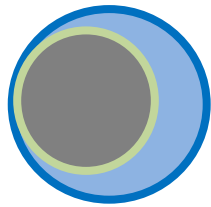




Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2024

Bagan Struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :





BAB II

PENGELOLAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Table 2.1. Keadaan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus
Pengadilan Tingkat Pertama

No	Satuan Kerja	Sisa perkara tahun lalu	Perkara Masuk 2025	Perkara yang dicabut	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim							
1.	Pidana	116	777	0	780	113	Pidana Biasa
		0	0	0	0	0	Pidana singkat/ingan/lain
		0	11	0	11	0	Pidana cepat
		0	4356	0	4356	0	Pidana lalu lintas
		0	3	0	3	0	Pidana pra peradilan
		1	39	0	38	2	Pidana Anak
		0	0	0	0	0	Tipikor
		0	0	0	0	0	Perikanan



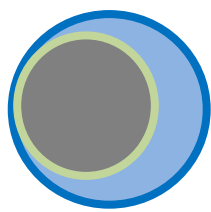


Table 2.2. Keadaan Perkara Perdata dan Perdata Khusus
Pengadilan Tingkat Pertama

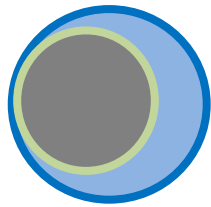
No	Satuan Kerja	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2025	Perkara yang dicabut	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim							
1.	Perdata	17	30	8	42	5	Gugatan
		1	42	6	43	0	Permohonan
		10	16	4	26	0	Gugatan sederhana
		0	0	0	0	0	Perlawanan (Derden Verzet)
		0	0	0	0	0	Perselisihan Hubungan Industri (PHI)

2. Keadaan perkara di tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Table 2.3. Keadaan Perkara di tingkat Banding

No	Satuan Kerja	Perkara banding 2025	Perkara putus tahun 2025	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	29	780	Pidana Biasa
		2	38	Pidana Anak
2.	Perdata	9	41	Gugatan





3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Table 2.4. Keadaan perkara di tingkat Kasasi

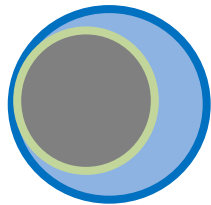
No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara yang mengajukan kasasi Tahun 2025	Perkara kasasi yang putus tahun 2025	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	6	4	Pidana Biasa
		0	0	Pidana Anak
2.	Perdata	4	1	Gugatan

4. Keadaan perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Table 2.5. Keadaan perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK)

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)	Perkara PK yang putus tahun 2025	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	1	1	Pidana Biasa
		0	0	Pidana Anak
2.	Perdata	3	1	Gugatan





B. PENYELESAIAN PERKARA

Table 2.6. Jumlah perkara perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu

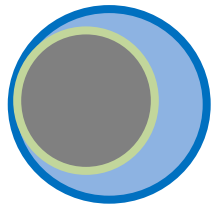
No	Satuan Kerja	Jumlah perkara Putus tahun 2025	Jumlah perkara putus tepat waktu Tahun 2025	Jumlah perkara putus tidak tepat waktu	Rasio Penyelesaian perkara putus tepat waktu
Pengadilan Negeri Muara Enim					
1.	Pidana	780	780	0	100%
2.	Perdata	112	98	14	87%

1. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Table 2.7. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No	Satuan Kerja	Jumlah perkara Putus tahun 2025	Perkara PN yang putus Tahun 2025 yang mengajukan upaya hukum banding	Perkara PN yang putus Tahun 2025 yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Perkara PN yang putus Tahun 2025 yang mengajukan upaya hukum PK
Pengadilan Negeri Muara Enim					
1.	Pidana	780	740	765	780
2.	Perdata	112	103	108	111





2. Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Table 2.8. Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

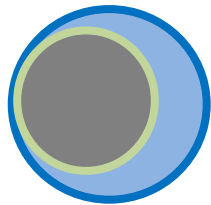
No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara yang diputus Tahun 2025	Jumlah Perkara yang diputus melalui Pendekatan Keadilan Restoratif tahun 2025
Pengadilan Negeri Muara Enim			
1.	Pidana	780	14

3. Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Table 2.9. Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2025	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Diselesaikan	
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Perdata	31	1	29	0	1





4. Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi

Table 2.10. Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi

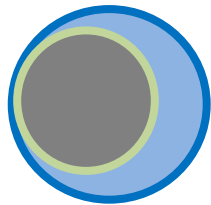
No	Satuan Kerja	Jumlah perkara Pidana Anak Tahun 2025	Jumlah perkara pidana anak yang diversi tahun 2025	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Diselesaikan	
Pengadilan Negeri Muara Enim							
1.	Pidana	41	8	2	6	33	0

5. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

Table 2.11 Jumlah Perkara perdata yng menggunakan e-Court

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata yang diputus Tahun 2025	Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan e-Court tahun 2025	Persentase Perkara Perdata yang menggunakan e-Court Tahun 2025
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	112	112	100%





6. Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)

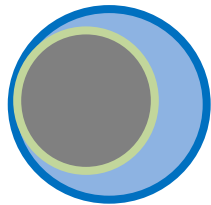
Table 2.12 Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025	Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	816	816	100%

7. Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)

Table 2.13 Jumlah Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)

JENIS PERKARA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
Pelimpahan	50	70	66	58	107	41	46	100	57	65	76	80	816
Penahanan	52	35	55	49	36	28	53	55	52	61	40	55	571
Sita	90	90	102	105	95	107	103	85	95	84	98	77	1131
Penggeledahan	25	17	36	15	27	31	29	25	28	27	31	35	326
Izin besuk	69	32	36	82	90	67	140	63	75	75	77	124	930
Pembantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversi	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4
Izin Pinjam Pakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Penahanan Banding	1	1	0	5	3	5	6	5	5	4	9	13	57
Penahanan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berkas Prapradilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penangguhan Penahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengalihan Penahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pindah Tempat Sidang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izin Keluar Tahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL													3837



No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara pidana yang diajukan Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025	Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	3837	3837	100%

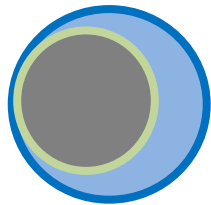
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

- **POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)**

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah satunya dengan pembentukan posbakum pengadilan. Posbakum (pos bantuan hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2025 mendapat anggaran dari Mahkamah Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 44,000,000,-. Realisasi untuk kegiatan posbakum ini adalah :





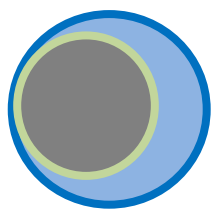
No	Satuan kerja	Pagu DIPA	Total realisasi		Sisa	Ket
			Rupiah	Persentase		
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Posbakum	Rp 44,000,000,-	Rp 44,000,000,-	100 %	0	

Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) Kabupaten Muara Enim dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 76/KPN.W6-U6/HK2.1/I/2025 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi.

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Dan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu, maka perlu dilakukan sosialisasi internal maupun eksternal mengenai program pembebasan biaya perkara atau prodeo terhadap masyarakat pencari





keadilan. Untuk permohonan Prodeo tersebut merupakan hak dan tidak ada yang menghalangi karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

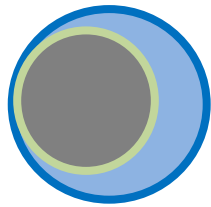
Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2025 mendapat anggaran dari Mahkamah Agung RI untuk Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) dalam DIPA 03 (Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 360,000,- Realisasi untuk kegiatan Prodeo ini adalah :

No	Satuan kerja	Pagu DIPA	Total realisasi		Sisa	Ket
			Rupiah	Persentase		
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 360,000,-	Rp 180.000,-	50 %	Rp 180.000,-	

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2025 untuk target perkara prodeo sebanyak 1 perkara telah terealisasi. Penanganan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) pada tahun 2025 :

Target Perkara yang di ajukan prodeo	Jumlah perkara yang mengajukan prodeo	Jumlah Perkara yang diselesaikan
1	1	1





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

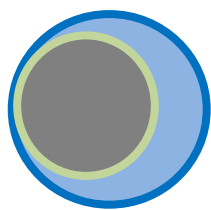
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang yang terdiri dari 14 (Empat Belas) orang Hakim dan 32 (Tiga Puluh Dua) pegawai.

a. Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II/c	1	4	5
II/d	1	-	
III/a	3	1	4
III/b	6	5	11
III/c	5	2	7
III/d	3	4	7
IV/a	2	2	4
IV/b	1	-	1
IV/c	-	-	-
V	5	-	-
IX	1	-	-
Jumlah	28	18	46





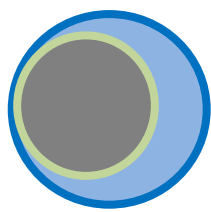
b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana (S-3)	-	-	-
Sarjana (S-2)	7	5	12
Sarjana (S-1)	13	9	22
Sarjana Muda	4	3	7
SMTA	5	-	5
SMTP	-	-	-
SD/SR	-	-	-
Jumlah	29	17	46

c. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Teknis / Non teknis / Staf

Jabatan Teknis/Non teknis	Golongan												Jumlah	
	I		II		III		IV		V		IX			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Hakim	-	-	-	-	6	6	2	-	-	-	-	-	8	6
Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panitera	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Panmud	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2
Kasubbag	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
PP	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	3
Jurusita	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	4	3
PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	6	-
CPNS	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
JUMLAH	-	-	2	4	17	12	3	2	5	-	1	-	28	18





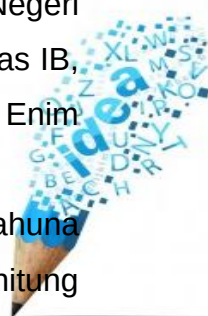
a. Mutasi

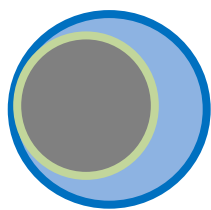
Adapun mutasi selama tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk

Adalah mutasi masuknya Hakim atau pegawai ke Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. RANGGA LUKITA DESNATA, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Bireuen menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025.
2. FRANS LUKAS SIANIPAR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025
3. MUHAMAD RIDWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim 11 Juli 2025
4. RIONALDO FERNANDEZ SIHITE, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025
5. MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Penajam menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025
6. GALIH PRAYUDO, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung





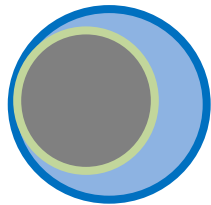
melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025

7. YURI ALPHA FAWNIA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025
8. SHUNITA LAXMI DEWI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manna menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025
9. DWI LESTARI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Waikabuba menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2025.
10. EVA RACHMAWATY, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas 1B, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Juli 2025
11. ANISA LESTARI, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 15 Juli 2025.

b. Mutasi Keluar

Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Muara Enim :





1. SERA RICKY SWANRI S, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 03 Juli 2025.
2. TITIS AYU WULANDARI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 03 Juli 2025.
3. ARIEF KARYADI, S.H., M.HUM. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Ketua Pengadilan Negeri Praya, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 24 September 2025.
4. DEWI YANTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Hakim Pengadilan Negeri Menggala, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 24 September 2025.

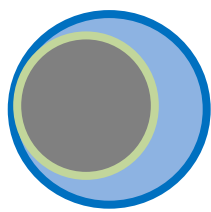
b. Promosi

Pada tahun 2025 tidak ada pegawai yang promosi

c. Pensiun dan Meninggal

Pada tahun 2025 tidak ada pegawai yang pensiun dan meninggal.

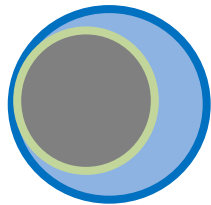




d. Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat

Data hakim yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2025 yaitu :

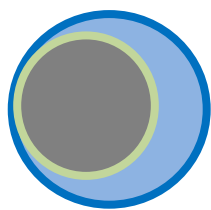
No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	Anisa Lestari, S.H., M.Kn.	Pelatihan Teknis Yudisial Filsifat Hukum	17 November 2025 s.d 21 November 2025	Pusdiklat MARI
2.	Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	16 November 2025 s.d 03 Desember 2025	Pusdiklat MARI
3.	Anisa Lestari, S.H., M.Kn.	Liputan untuk Majalah Dandapala Dirjen Badilum MARI	16 Desember 2025 s.d 18 Desember 2025	MARI
4.	Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum	17 November 2025 s.d 21 November 2025	Pusdiklat Mari
5.	Ari Qurniawan, SH., MH	Pelatihan Tingkat Pendalaman substansi dan kebaruan hukum Pidana Nasional (UU No 1 Tahun 2023) bagi hakim pemeriksa perkara pidana tingkat pertama	Tahap : 1 25 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2025 Tahap : 2 27 Agustus 2025 s.d 29 Agustus 2025	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan



		dan tingkat banding peradilan umum dan peradilan agama seluruh Indonesia gelombang 1		
6.	Ari Qurniawan, SH., MH	Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	28 Agustus 2025	Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi
7.	Ari Qurniawan, SH., MH	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum	20 Mei 2025 s.d 23 Mei 2025	Komisi Yudisial RI

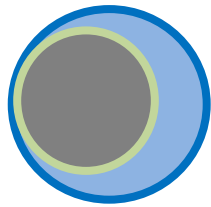
Data Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2025 yaitu :

No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	Harmen, S.H	Pemanggilan Peserta Assesment	25 Juni 2025 s.d 26 Juni 2025	MARI
2.	Iwan Fajri, A.Md	Diklat Bendahara Penerima	11 Agustus 2025 s.d 15 Agustus 2025	Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan Kemenkeu
3.	Budi Dermawan, ST	Latsar CPNS	08 September 2025 s.d 29 September 2025	Badan Strajak Badan Diklat Kumdil MARI
4.	Jimmy Octavianus, A.Md	Pelatihan Teknis Yudisial	27 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025	Pusdiklat MARI
5.	Harmen, S.H	Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial	30 Oktober 2025	MARI



6.	- Heru Agustian, S.H - Febri Alvando - Encep Syamsul Bahri - Fidriansyah - Budiansyah - Desi Robianyah	Bimtek Manajemen PPPK	27 November 2025	BIRO Kepegawaian MARI
7.	Yurika Ariani, S.T., M.M	Undangan Pembinaan Administrasi Kesekretariatan	11 Desember 2025 s.d 13 Desember 2025	MARI
8.	Hendrik, SH	Bimtek Kepegawaian	16 Desember 2025 s.d 18 Desember 2025	BIRO Kepegawaian MARI
9.	- Yurika Ariani, S.T., M.M - Rulita Widayanti, A.Md.T - Desi Robianyah	Bimtek SAKIP	17 Desember 2025	BIRO Perencanaan MARI
10.	Heriyanto, SH	Diklat PPSPM	12 Desember 2025 s.d 19 Desember 2025	KPPN Lahat





BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

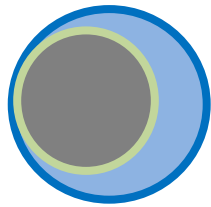
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2025, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentas	
1	Belanja pegawai	Rp 5,214,009,000	Rp 5,140,573,181	98.59 %	Rp 73,435,819
2	Belanja Barang	Rp 1,241,340,000	Rp 1,227,011,966	98.85 %	Rp 14,328,034



3	Belanja Modal	Rp 398,974,000	Rp 341,000,000	85.47 %	Rp 57,974,000
Total		Rp 6,854,323,000	Rp 6,708,585,147	97.87 %	Rp 145,737,853

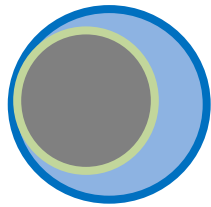
2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentase	
1	Belanja Barang	Rp 323,391,000	Rp 316,612,150	97.90 %	Rp 6,778,850
Total		Rp 323,391,000	Rp 316,612,150	97.90 %	Rp 6,778,850

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

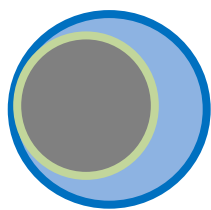




Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034 m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan sampai saat ini masih belum *prototype* sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Muara Enim, kondisinya:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim 1. Kendaraan Roda 4 a. Kijang Innova b. Mitsubishi Xpander 2. Kendaraan Roda 2 a. Honda NF.100 b. Honda NF.100 c. Honda Supra XNF 125 50 d. Honda Supra XNF 125 50	a. 2008 b. 2025 a. 2003 b. 2003 c. 2005 d. 2005	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - - -	- - - - - -	- - STNK.AN .PT.PLG STNK.AN .PT.PLG



2	Pinjam Pakai dari PEMKAB Muara Enim					
	1. Kendaraan Roda 4			-	-	-
	a. Rush 1.5 M/T	a. 2022	✓	-	-	-
	b. Fortuner 2.8 GR 4X4 A/T	b. 2023	✓	-	-	-
	c. Toyota Kijang Standar KF 80 Log	c. 2003	✓	-	-	-
	d. Izuzu Panther Turbo LV	d. 2013	✓	-	-	-
	2. Kendaraan Roda 2		✓	-	-	-
	a. Honda trail /T4G02T31L0 M/T	a. 2022	✓	-	-	-
	b. Honda trail /T4G02T31L0 M/T	b. 2022				

Untuk kendaraan dinas roda empat (4), pada tahun 2025 sebanyak lima (5) unit yang digunakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera, dan Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan Pengadilan Negeri Muara Enim

Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak enam (6) unit. Yaitu :

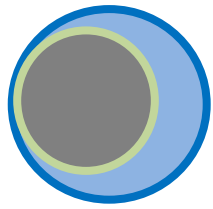
- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005, kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Jurusita
- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD tahun 2005 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Teknisi Sarana dan Prasarana.
- 1 (satu) honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6004 DZ digunakan oleh Jurusita Pengganti.
- 1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Operator Layanan operasional.





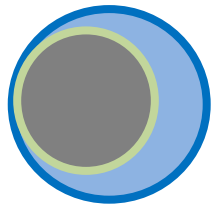
- Adapun sarana dan prasarana pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :





Ruang sidang anak



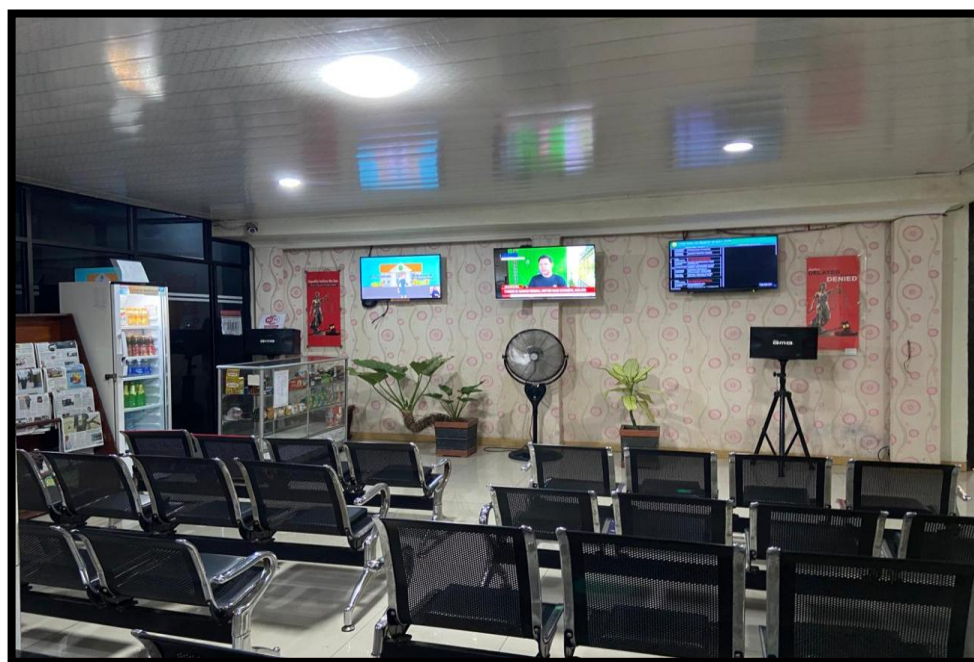
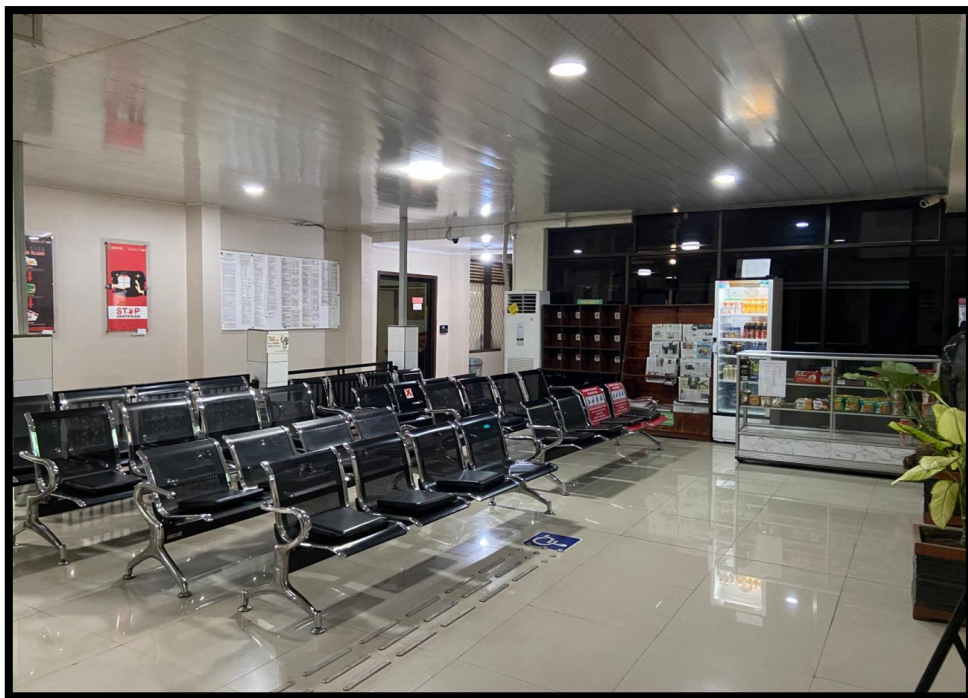
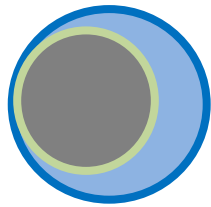


Ruang tunggu : anak korban, orang tua, BAPAS, penasehat hukum



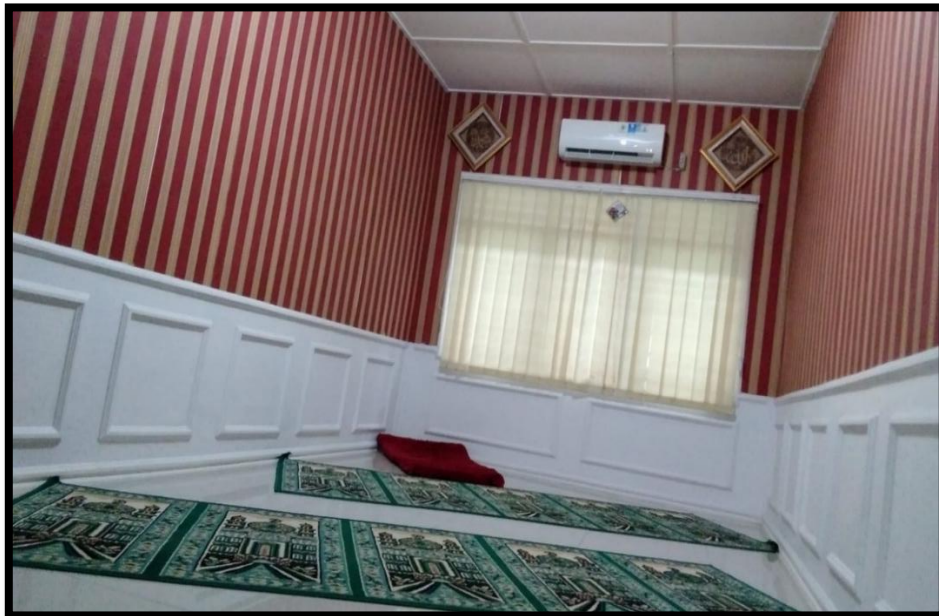
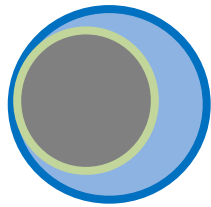
Ruang video Conference pada ruang sidang anak

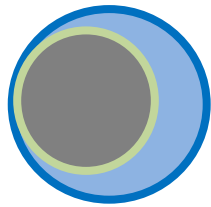




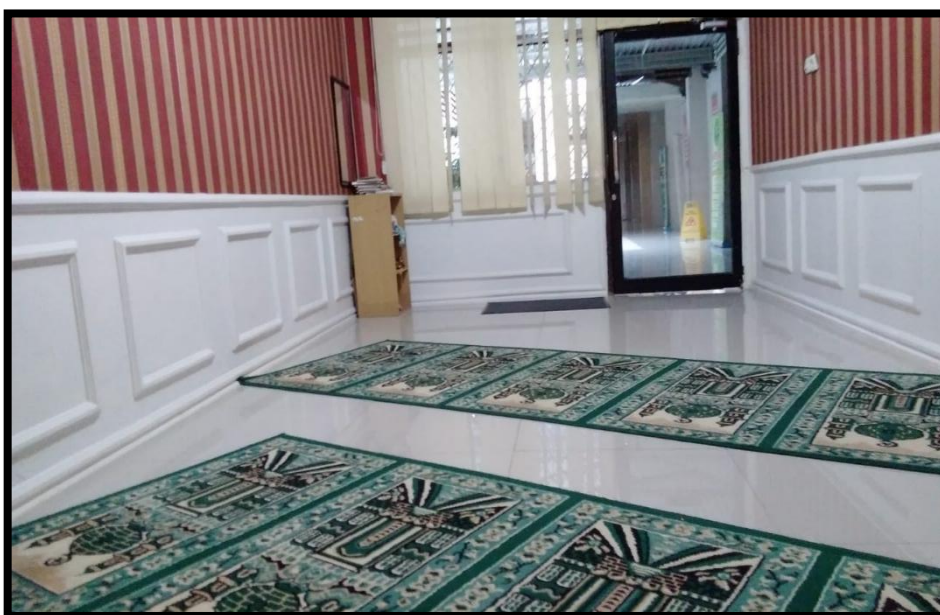
Ruang tunggu pengunjung dengan memasang TV jadwal sidang dan TV biaya radius perkara perdata





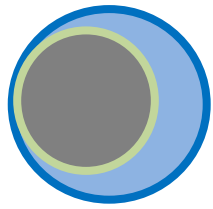


Ruang Tunggu Terbuka



Musholla



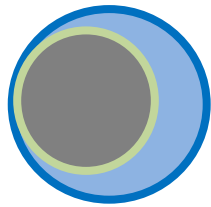


Ruang POSBAKUM



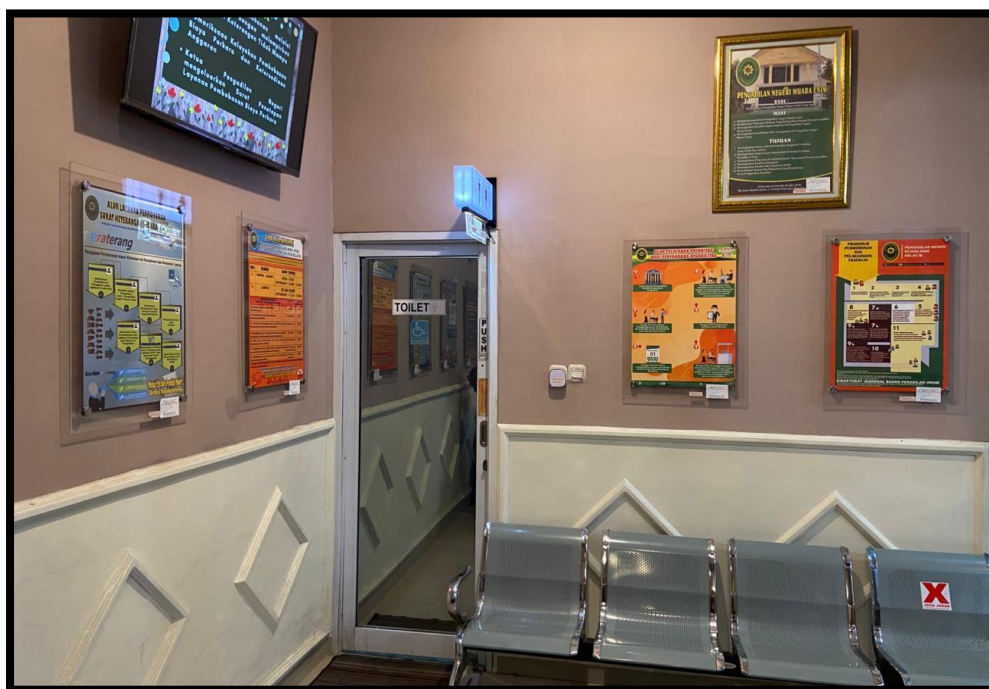
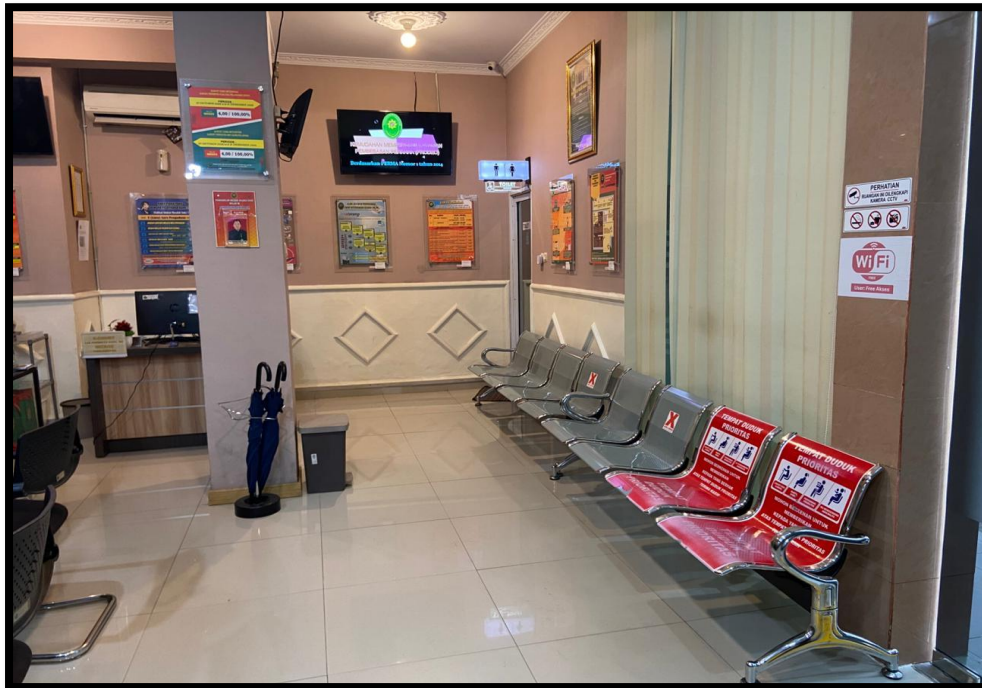
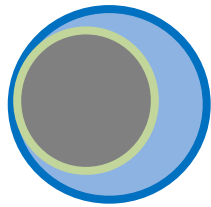
Ruang tunggu Jaksa





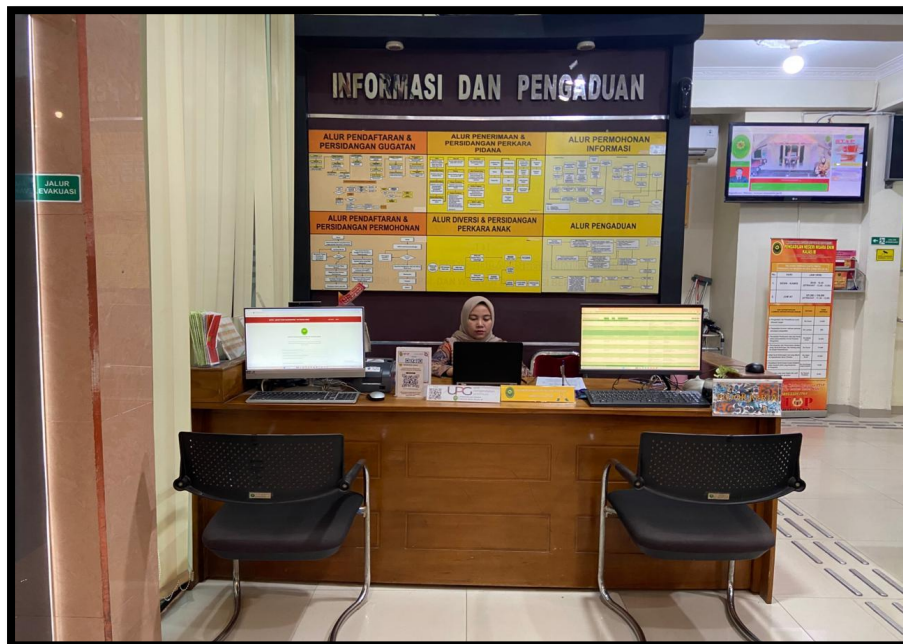
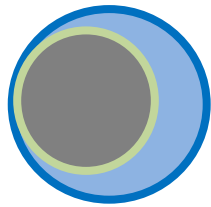
Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



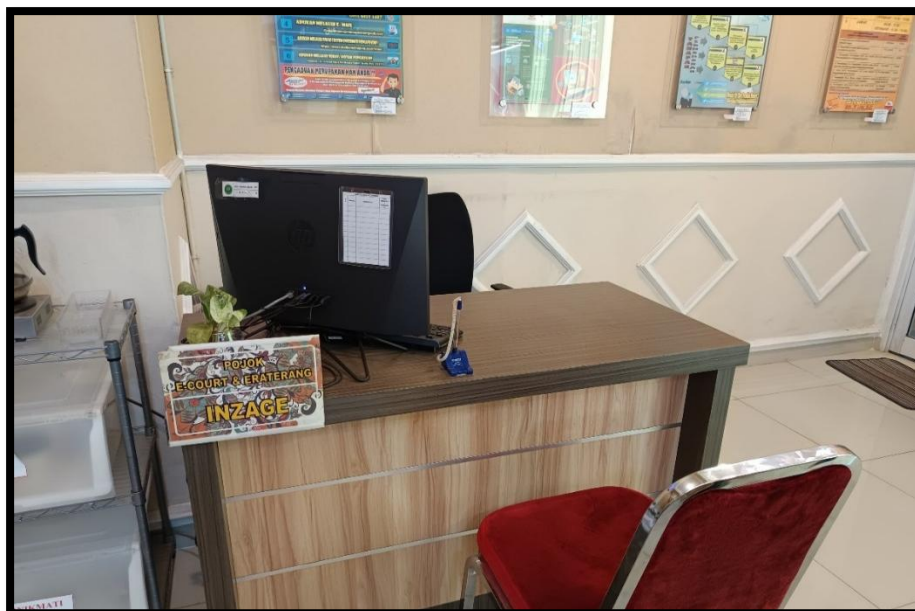


Kursi pengunjung PTSP dilengkapi dengan antrian pengunjung, media informasi (TV informasi) dan toilet khusus pengunjung



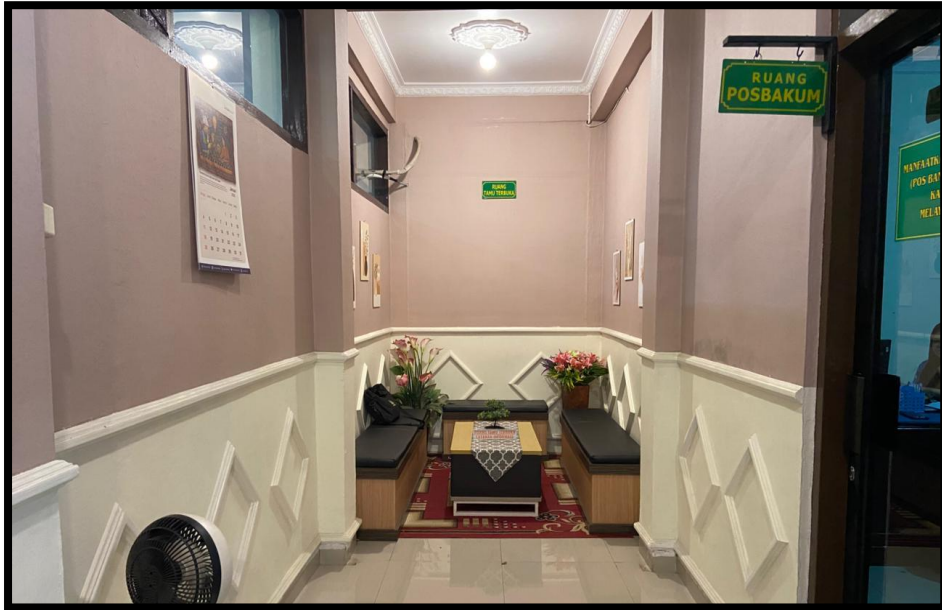
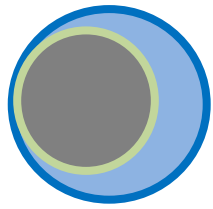


Meja Informasi dan Pengaduan



Pojok E-COURT & ERATERANG
Meja Inzage



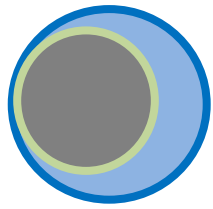


Ruang khusus tamu pengunjung



Jalur khusus difabel



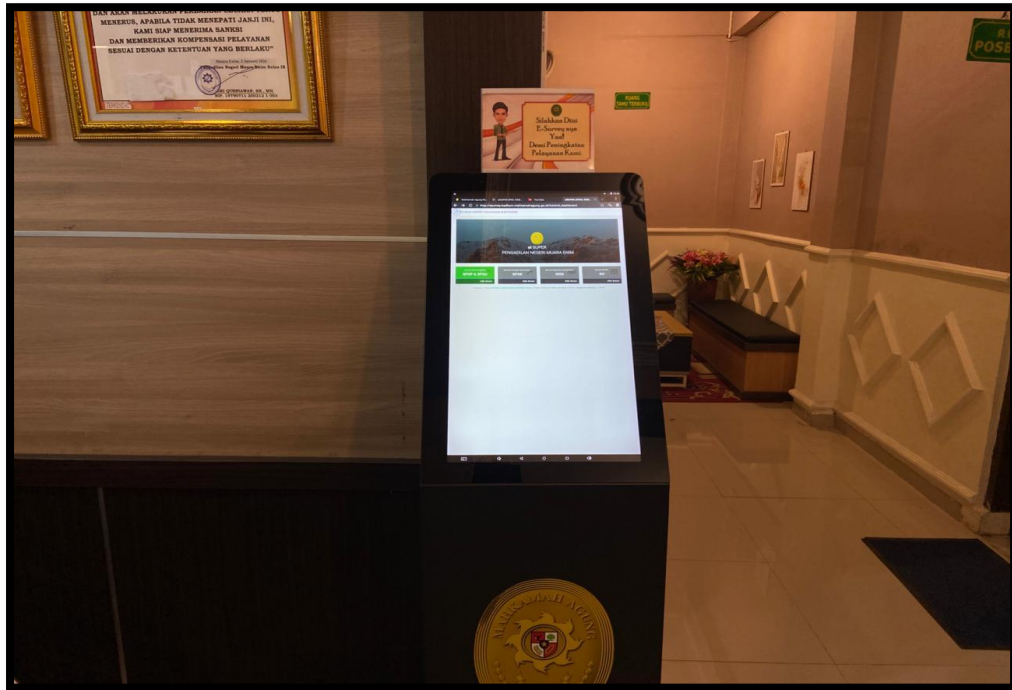
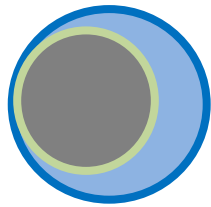


Area parkir khusus untuk disabilitas



Kursi roda untuk penyandang disabilitas

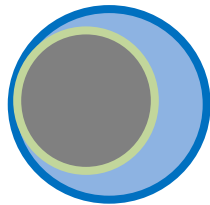




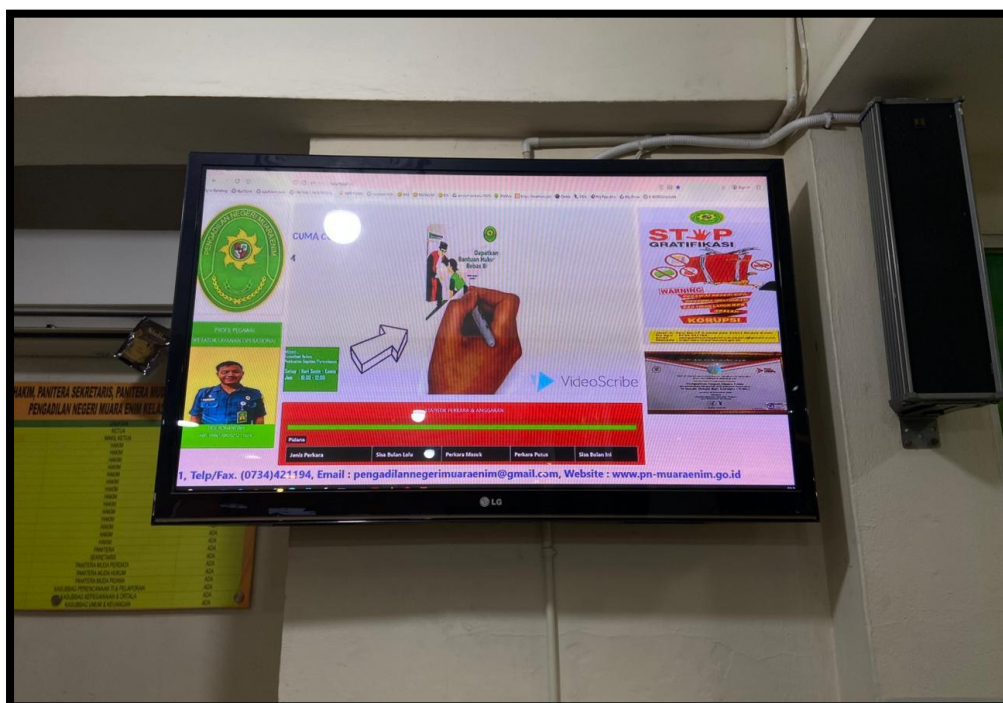
Kios K touchscreen untuk Survei IPK dan IKM



Meja untuk pengunjung menulis

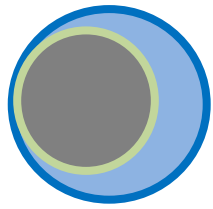


Kotak saran manu



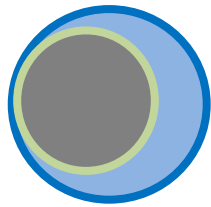
Televisi Informasi Profil





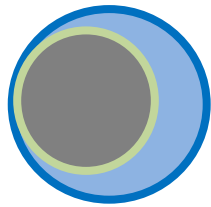
Ruang Mediasi





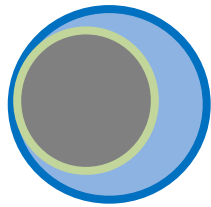
Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja





Ruang sidang Cakra



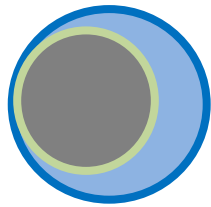


Akses masuk ruangan dengan finger scan / card scan



Ruang Media Center

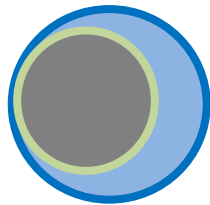




Ruang Server

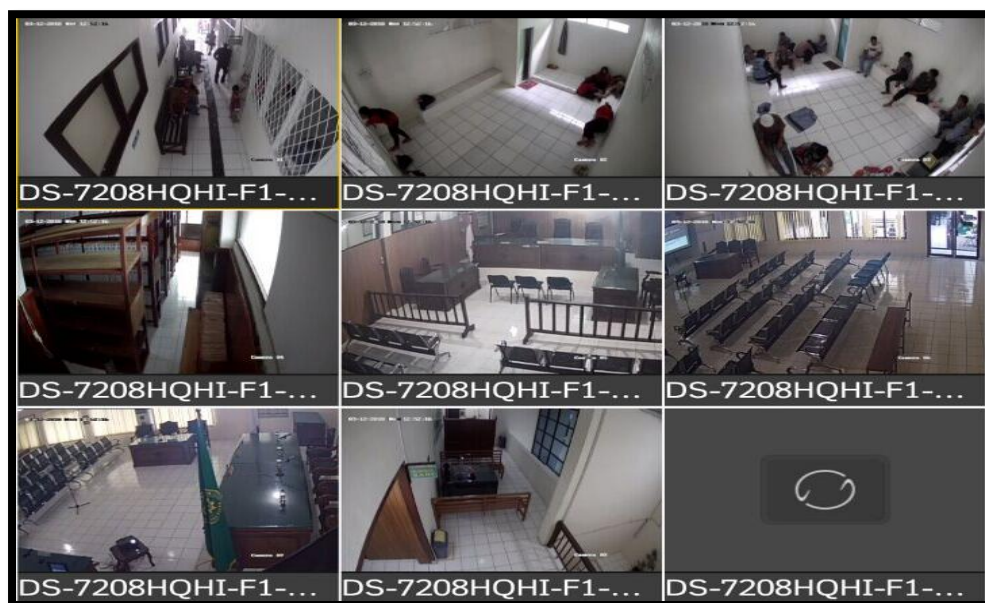
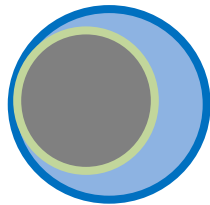


Toilet untuk Disabilitas



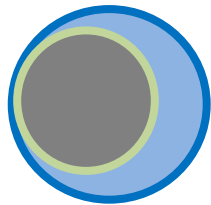
Ruang perpustakaan





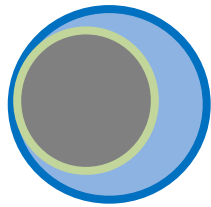
CCTV





Mesin genset





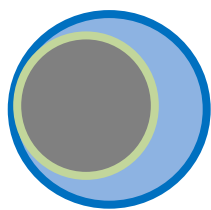
Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Muara Enim :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim					
	1. Rumah Dinas ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 11
	2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 12
	3. Rumah Dinas hakim	6	✓	-	-	Sertifikat No. 28
	4. Rumah Dinas Panitera	1	✓	-	-	Sertifikat No. 29

Laporan Barang Milik Negara berupa sarana prasarana Pengadilan Negeri Muara Enim :

Uraian	Jumlah	Keterangan
1. Ruang Ketua	1	Baik
2. Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3. Ruang Hakim	2	Baik
4. Ruang Panitera	1	Baik
5. Ruang Sekretaris	1	Baik
6. Ruang Sidang Umum	1	Baik
7. Ruang Sidang Ramah Anak	1	Baik
8. Ruang Tunggu Bapas, BK	1	Baik
9. Ruang Tunggu Ramah Anak	1	Baik
10. Ruang Videoconference anak	1	Baik
11. Ruang Mediasi/Kaukus	1	Baik
12. Ruang Kepaniteraan	3	Baik
13. Ruang Kesekretariatan	3	Baik





14. Ruang Perpustakaan	1	Baik
15. Ruang DYK	1	Baik
16. Ruang Mushollah	1	Baik
17. Ruang Tahanan Dewasa	1	Baik
18. Ruang Tahanan Wanita	1	Baik
19. Ruang Tunggu Jaksa	1	Baik
20. Ruang Posbakum	1	Baik
21. Ruang Laktasi	1	Baik
22. Ruang Arsip	3	Baik
23. Ruang PTSP dan Informasi	1	Baik
24. Ruang Tunggu Pengunjung	1	Baik
25. Area Merokok	1	Baik
26. Ruang Tunggu KPN, WKPN,	1	Baik
27. Toilet KPN, WKPN, Hakim, Panitera	4	Baik
28. Toilet Pengunjung Laki- laki/Perempuan	2	Baik
29. Toilet Disabilitas	1	Baik
30. Toilet Pengunjung PTSP	1	Baik
31. Ruang Tunggu Tamu Terbuka Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran	1	Baik
32. Ruang Server	1	Baik
33. Ruang Media Center	1	



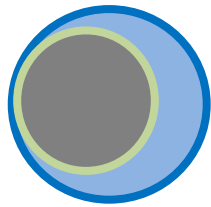
C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem untuk melakukan pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.



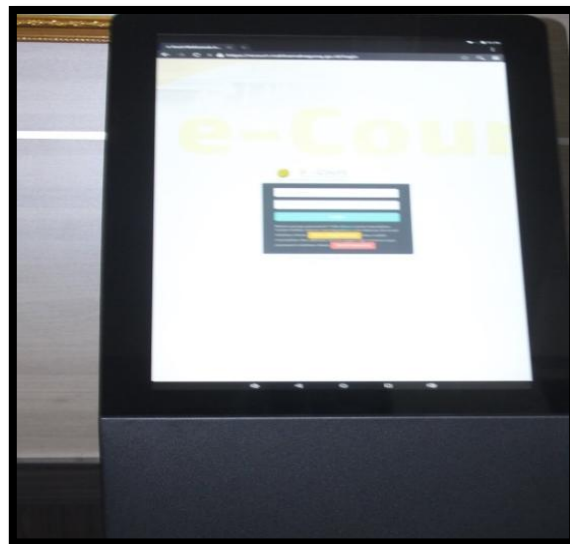
Aplikasi e-court



Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi e-court tersebut adalah :

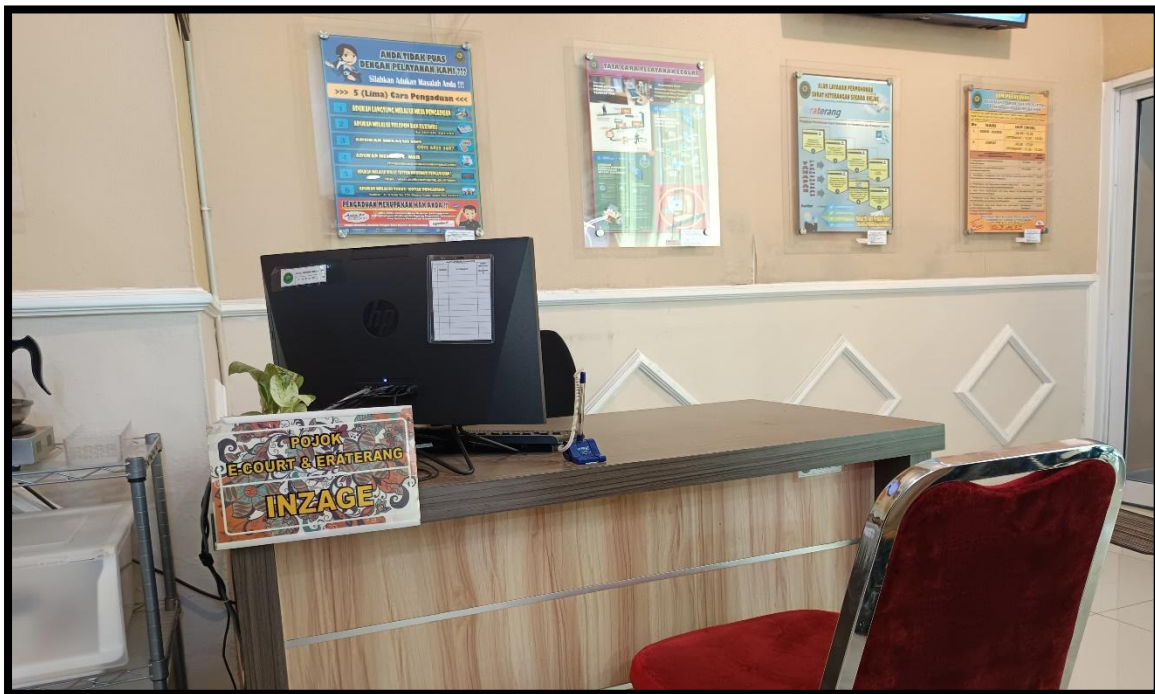
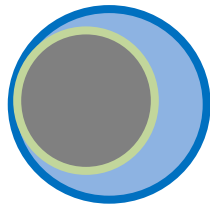
1. Pemasangan sapras pendukung e-court yaitu :

- Kios Touchscreen untuk aplikasi e-court



Kios-K Touchscreen



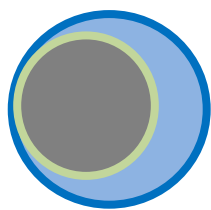


Pojok e-court, eraterang dan Meja Inzage

2. Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik pada tahun 2025 :

Perkara	Jumlah pengajuan secara e-court
Gugatan	30
Gugatan Sederhana	16
Permohonan	42
Permohonan Konsinyasi	1





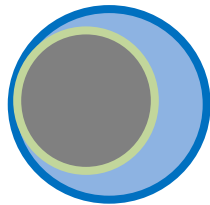
b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi pengawasan internal.

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP tersebut adalah :

- Peningkatan bandwidth internet dengan menggunakan internet dedicated yaitu bandwidth 105 Mbps.
- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi 6.0.1
- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi 6.0.1 yang beralamat di <http://sipp.pn-muaraenim.go.id>





Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Evaluasi Implementasi SIPP untuk Pengadilan Kelas IB Seluruh Indonesia, dengan kategori jumlah perkara 501-1000 perkara, nilai yang didapatkan untuk periode Januari sampai Desember 2025 adalah sebesar 97.98% Dengan pencapaian ini diharapkan pada tahun 2026 Pengadilan Negeri Muara Enim dapat mempertahankannya dan meningkatkannya lagi.



Informasi

04/11/2024 | Publikasi Evaluasi Implementasi SIPP Periode November 2024

04/10/2024 | Publikasi Evaluasi Implementasi SIPP Periode Oktober 2024

20/03/2024 | Revisi Penilaian Pada Aplikasi EIS

Pencarian

Seluruh Pengadilan

501 - 1000 Perkara

IB

Januari

2025

Desember

2025

cari

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA TERTINGGI BERDASARKAN KELAS PENGADILAN

Pengadilan Negeri Surakarta
98.64%

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

Pengadilan Negeri Martapura
99.14%

Pengadilan Negeri Kelas IA

Pengadilan Negeri Lahat
99.41%

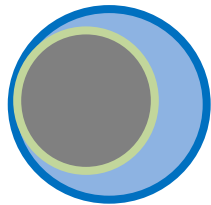
Pengadilan Negeri Kelas IB

Pengadilan Negeri Dataran Hunimaa
99.66%

Pengadilan Negeri Kelas II

40	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Bangkalan	96.4%	98.49%	99.15%	98.23%	★★★★★ 98.07% (977)
41	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Garut	96.68%	98.21%	98.2%	99.07%	★★★★★ 98.04% (981)
42	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Simalungun	93.26%	98.78%	100%	99.96%	★★★★★ 98% (983)
43	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Muara Enim	95.78%	96.66%	99.97%	99.52%	★★★★★ 97.98% (961)
44	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Karanganyar	95.33%	99.07%	99.19%	98.2%	★★★★★ 97.95% (982)
45	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Sekayu	96.27%	96.91%	99.06%	99.46%	★★★★★ 97.92% (976)
46	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Cianjur	95.44%	98.74%	99.68%	97.61%	★★★★★ 97.87% (976)
47	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Cibadak	95.41%	97.8%	99.79%	98.46%	★★★★★ 97.86% (974)
48	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Ketapang	96.34%	97.74%	99.99%	97.39%	★★★★★ 97.86% (976)
49	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Praya	94.18%	98.9%	99.77%	98.15%	★★★★★ 97.75% (962)
50	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Kayuagung	95.93%	98.93%	98.07%	97.66%	★★★★★ 97.65% (980)





c. Implementasi e-Berpadu di lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
- Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- Penangguhan Penahanan
- Permohonan Pembantaran Penahanan
- Permohonan Penetapan Diversi
- Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan



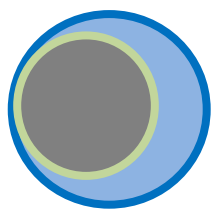
- Pendaftaran Praperadilan Elektronik
- Permohonan Izin Keluar Tahanan
- Permohonan Pengalihan Penahanan
- Permohonan Penangguhan Penahanan.



Aplikasi e-Berpadu

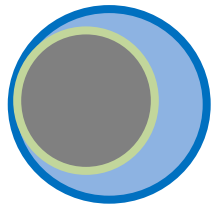
Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik pada tahun 2025 :

Perkara	Jumlah pengajuan secara e-Berpadu
Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik	604
Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan	317



Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan	1097
Pengajuan Perpanjangan Penahanan	565
Penangguhan Penahanan	0
Permohonan Pembantaran Penahanan	0
Permohonan Penetapan Diversi	3
Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	2
Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan	929
Pendaftaran Praperadilan Elektronik	0
Permohonan Izin Keluar Tahanan	0
Permohonan Izin Keluar Tahanan	0
Permohonan Pengalihan Penahanan	0
Permohonan Penangguhan Penahanan.	0





BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Program AMPUH (SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

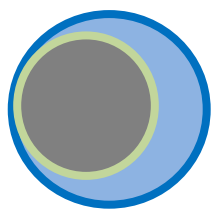
Kegiatan asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi 3 (tiga) kegiatan asesmen secara menyeluruh sebagai berikut :

b. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengamatan oleh Asesor :

- 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP
- Disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan name tag, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas)



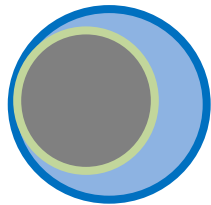


- Pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindak lanjut tiga unsur terendah)
 - Pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP
 - Penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan).
- c. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- d. Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Asesmen ini dilakukan oleh tim aparatur yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Tim tersebut wajib melakukan monitoring minimal 10 (sepuluh) kali dalam sebulan dan melaporkan hasil monitoring secara berkala dengan lembar monitoring yang sudah disediakan tersebut setiap bulan kepada Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.





2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP).

Dilakukan oleh tim Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilakukan setiap bulan dan wajib mengkoordinasikannya kepada Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

3. Asesmen Kinerja dan Layanan dalam kerangka sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)

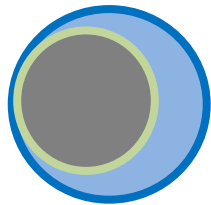
Dalam bentuk kegiatan asesmen oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Tim Pengadilan Tinggi yang sudah terakreditasi/ yang sudah diberikan sertifikat mutu pengadilan unggul ke satuan kerja yang dinilai dengan menggunakan lembar asesmen.

Pada tahun 2025, pelaksanaan assessment AMPUH pada Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 April 2025. Predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan tangguh (AMPUH) pada tahun 2025 dengan Nilai : 810.61 Predikat : UNGGUL

C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.



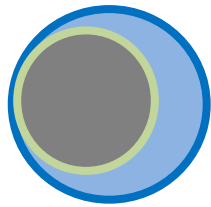


Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara, permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara, layananan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

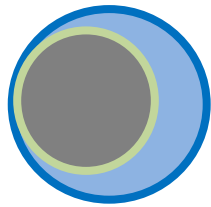
1. Meja Informasi dan Pengaduan
2. Meja layanan PTSP (Umum, Pidana, Perdata, Hukum)
3. Meja Inzage
4. Kursi pengguna layanan PTSP
5. Mesin antrian pengunjung
6. Kios-K touchscreen untuk aplikasi e-court dan eraterang



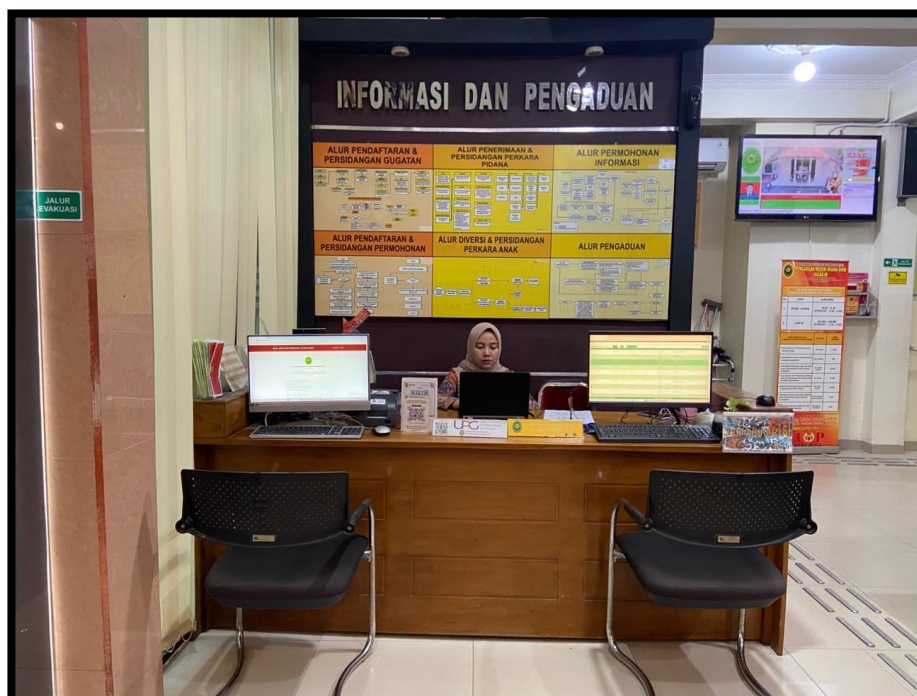


7. Air mineral untuk pengunjung
8. Brosur-brosur produk layanan PTSP
9. Kotak saran dan pengaduan
10. Banner dan pamflet informasi Pengadilan
11. Meja untuk menulis bagi pengguna layanan PTSP
12. Mesin EDC
13. Kamera pengawas (CCTV)
14. PC untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi secara elektronik
15. PC dan printer scanner pada masing-masing meja pelayanan.
16. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas
17. Kursi roda bagi penyandang disabilitas



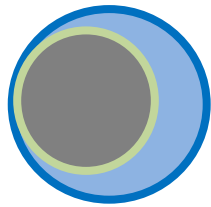


Meja PTSP



Meja Informasi dan Pengaduan dengan antrian pengunjung



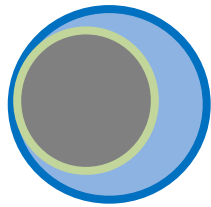


Kursi pengunjung



Meja Inzage dan Pojok e-court

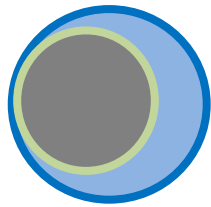




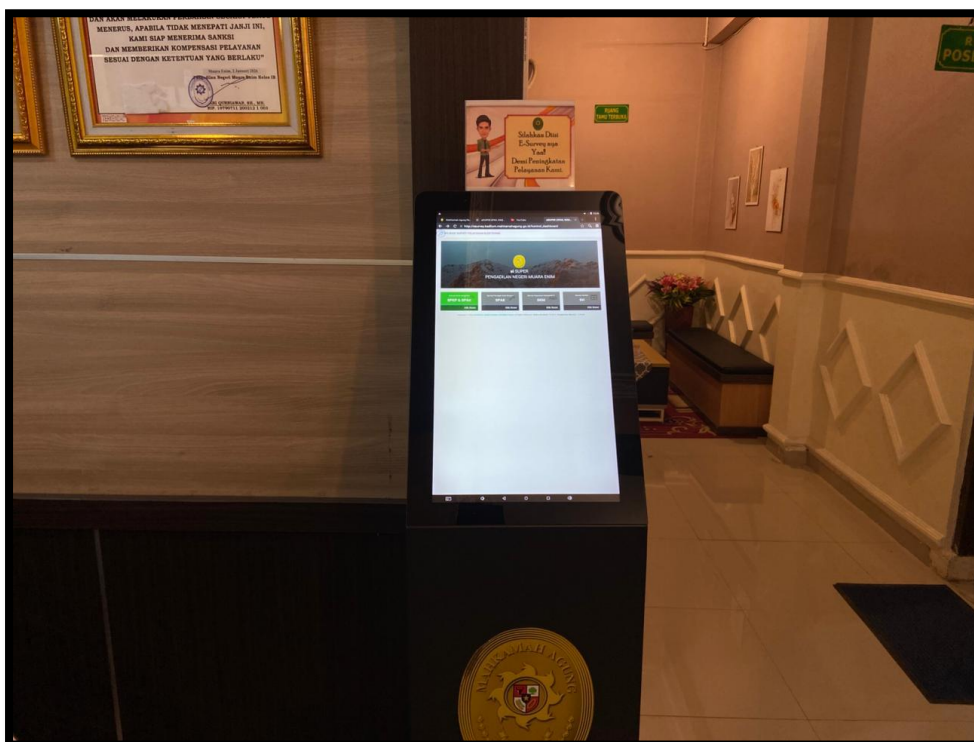
Kursi roda untuk difabel



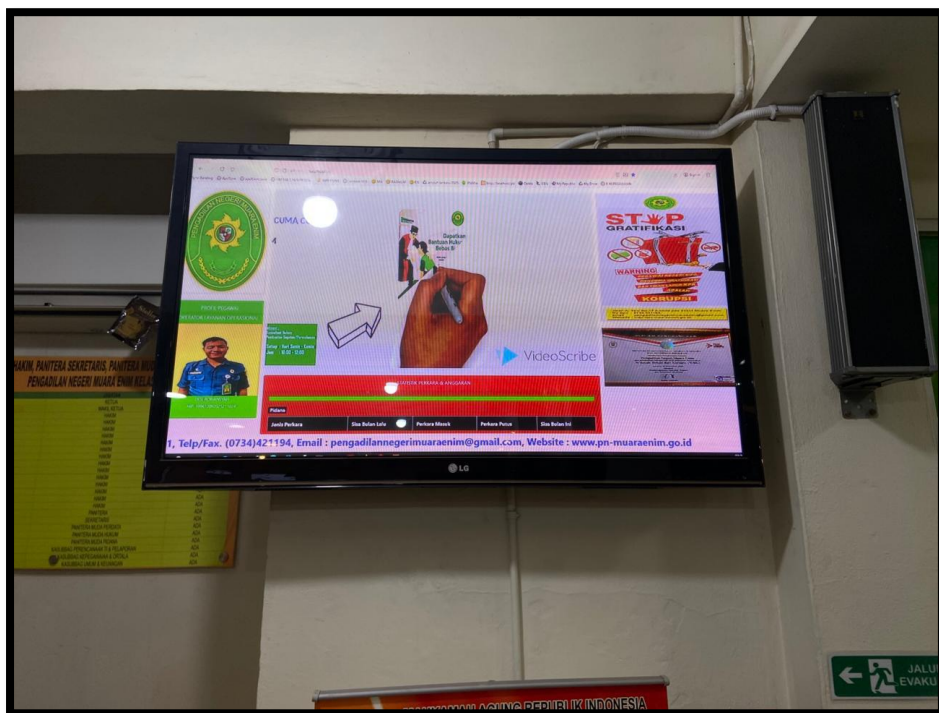
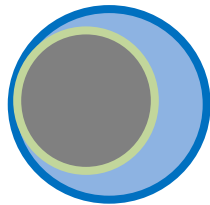
Meja tulis pengguna PTSP



Kotak Saran



Survey IKM dan IPK secara elektronik

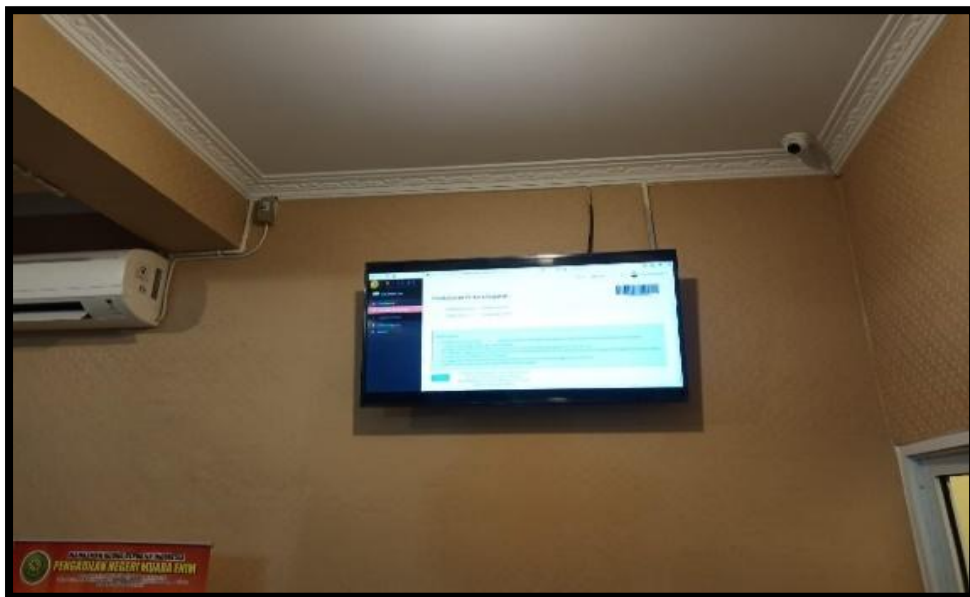
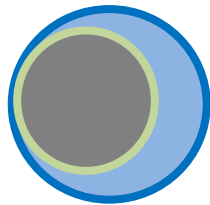


TV Profil Pengadilan

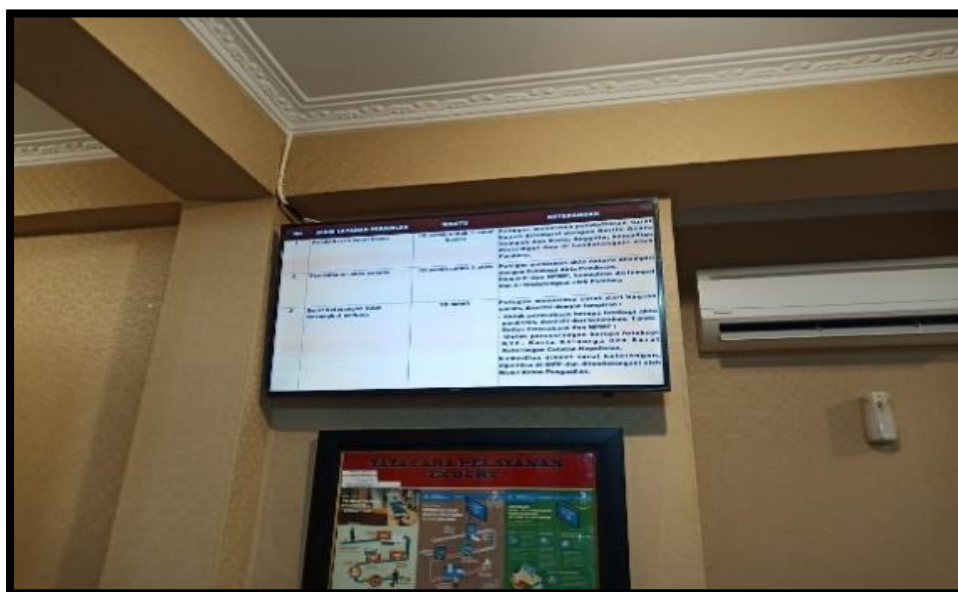


Kios-K Touchscreen e-court dan Eraterang



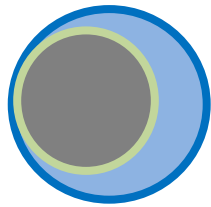


TV informasi produk PTSP



TV informasi jangka waktu pelayanan



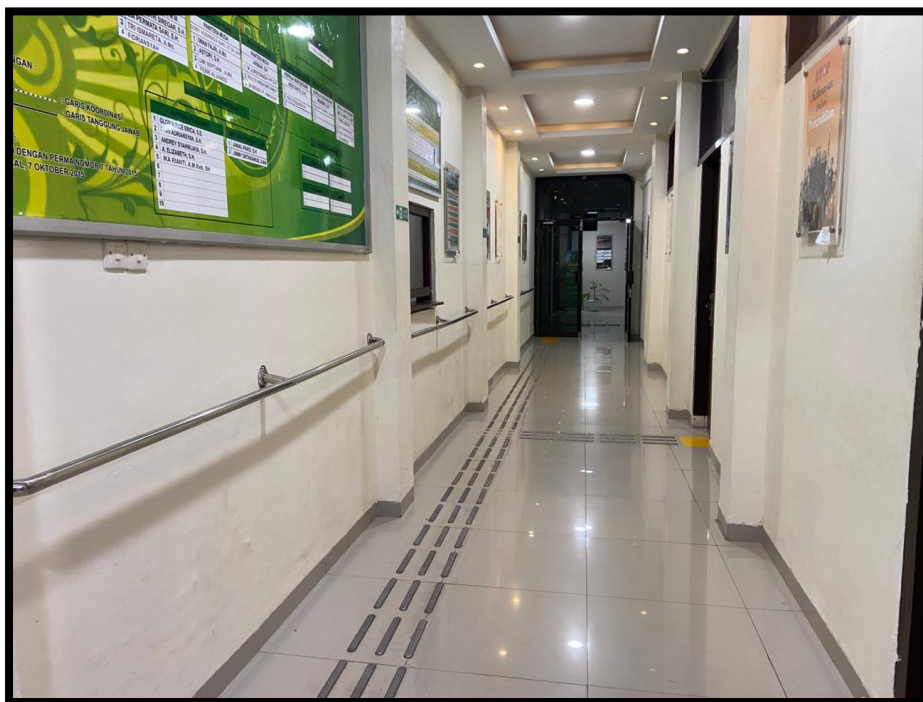
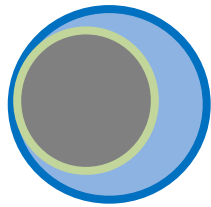


Toilet PTSP



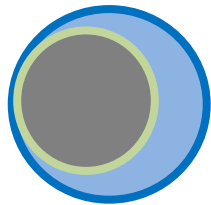
Ruang Tamu Terbuka





Jalur khusus difabel



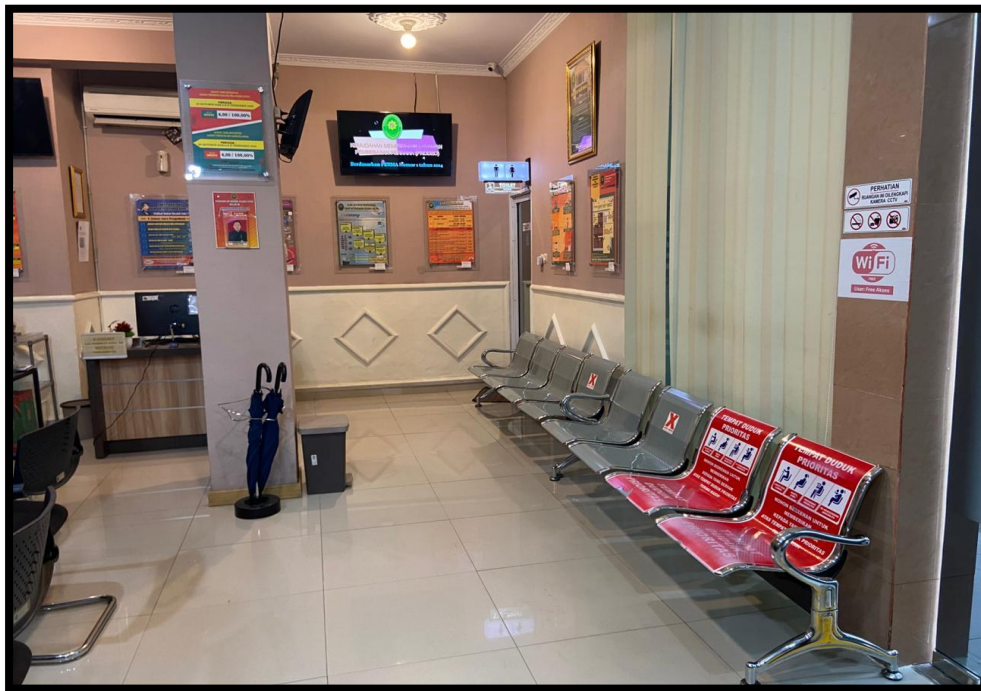
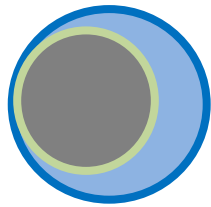


Antrian Prioritas



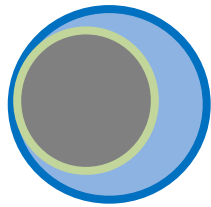
Tongkat Kaki Tiga





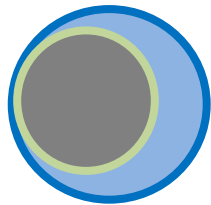
Tempat Duduk Prioritas





CCTV pada PTSP





Berikut jumlah surat pada tahun 2025 :

No	Jenis Surat	Jumlah
1	Surat Masuk	916
2.	Surat Keluar	2295
3.	Permohonan Surat Keterangan (SUKET) pada aplikasi eraterang	517

Untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTSP, Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan survey kepuasan kepada masyarakat dan survey persepsi korupsi menggunakan aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Badan Peradilan Umum. Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2025.

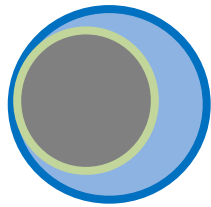
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SKALA	TRIWULAN 1 (JAN-MAR)	JML RESPONDEN TRW 1	TRIWULAN 2 (APR-JUN)	JML RESPONDEN TRW 2	TRIWULAN 3 (JUL-SEPT)	JML RESPONDEN TRW 3	TRIWULAN 4 (OKT-DES)	JML RESPONDEN TRW 4
1-100	99,78	101	99,42	95	98,95	143	99,57	90
1-4	3,99		3,98		3,96		3,98	

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

SKALA	TRIWULAN 1 (JAN-MAR)	JML RESPONDEN TRW 1	TRIWULAN 2 (APR-JUN)	JML RESPONDEN TRW 2	TRIWULAN 3 (JUL-SEPT)	JML RESPONDEN TRW 3	TRIWULAN 4 (OKT-DES)	JML RESPONDEN TRW 4
1-100	99,24	99	94,42	92	99,93	150	98	90
1-4	3,97		3,98		4,00		3,92	





C. Inovasi Pelayanan Publik

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para pengguna peradilan.

1. Buku Tamu Elektronik PN Muara Enim

Buku Tamu Elektronik PN Muara Enim adalah aplikasi berbasis elektronik yang merekam data atau informasi terkait tamu /pengunjung yang memerlukan pelayanan pada meja PTSP dan tamu /pengunjung umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur Perekam Wajah dan Notifikasi via telegram.

PN Muara Enim

Menu / Home / Login

Home LOGIN

Login Buku Tamu

User Name

Password

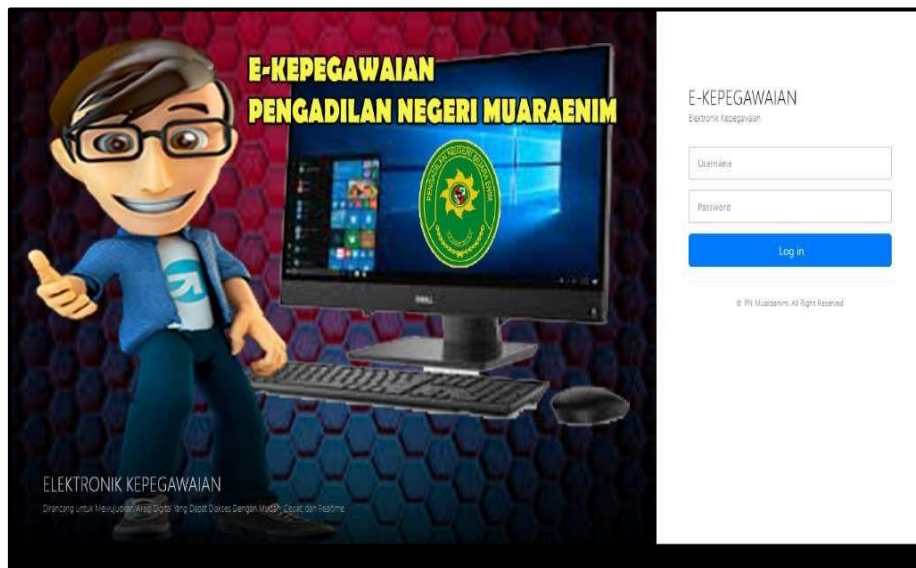
Submit Cancel

Copyright © 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim. All rights reserved. Versi 1.0.0.1



2. Aplikasi E-Kepegawaian

Aplikasi E-Kepegawaian merupakan aplikasi berbasis elektronik yang dirancang untuk mewujudkan sistem kearsipan data. Administrator dalam hal ini bidang Kepegawaian melakukan pengarsipan terkait data secara online dalam bentuk format yang diinginkan guna pencarian yang mudah dan cepat terkait arsip kepegawaian.



Arsip Surat Keputusan KPN

Cari: Tampilkan: 10

No	Tanggal SK	Nama SK	File SK
1	10-12-2022	SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
2	09-12-2022	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Download
3	09-12-2022	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Download
4	09-12-2022	TIM SELEKSI CAON LEMBAGA PEMBIER LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBALUM) PADA PNMBE	Download
5	10-11-2022	SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITIA PENGACHTING DALAM MAJELIS HAKIM, JADWAL HARI DAN JAM SIDANG PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
6	02-11-2022	PEMBENTUKAN TIM SURVEI HARIAN KEPUASAN MASYARAKAT PADA APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIK (SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
7	02-11-2022	PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
8	02-11-2022	PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Download
9	12-10-2022	PEMBENTUKAN TI EVALUASI TERHADAP TENAGA PPSPN	Download
10	11-10-2022	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALIS JABATAN ANALIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Download

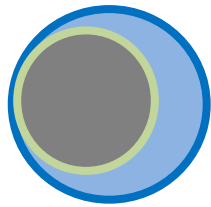
Halaman: 1 dari 29

Previous 1 2 3 4 5 29 Next

E-KEPEGAWAIAN PN MUARAENIM Tautan Terkait

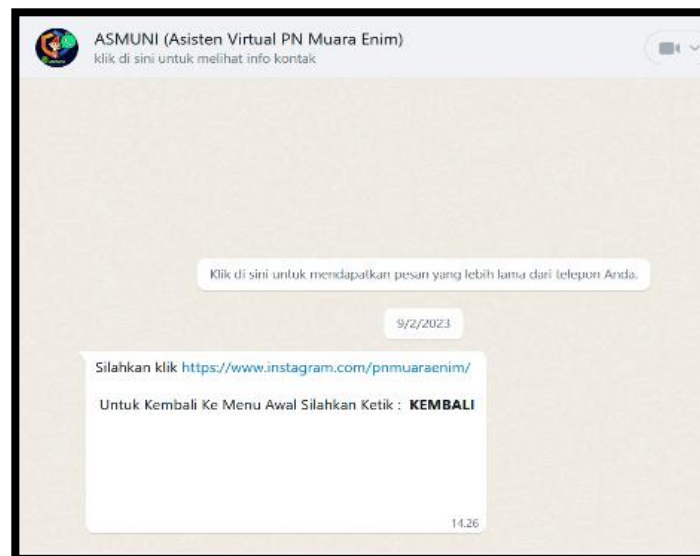
Masukkan Tanggal Berikan dan Masukkan ke dalam

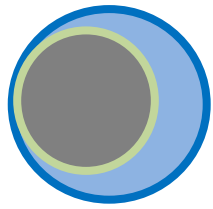




3. ASMUNI (Asisten Virtual PN Muara Enim)

ASMUNI merupakan Virtual Whatsapp informasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Pengunjung dapat mengakses ASMUNI via Aplikasi Whatsapp dengan Scan Barcode atau menambahkan Kontak ASMUNI. Pengunjung juga dapat mengakses aplikasi ASMUNI pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim.

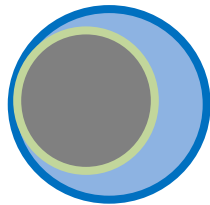




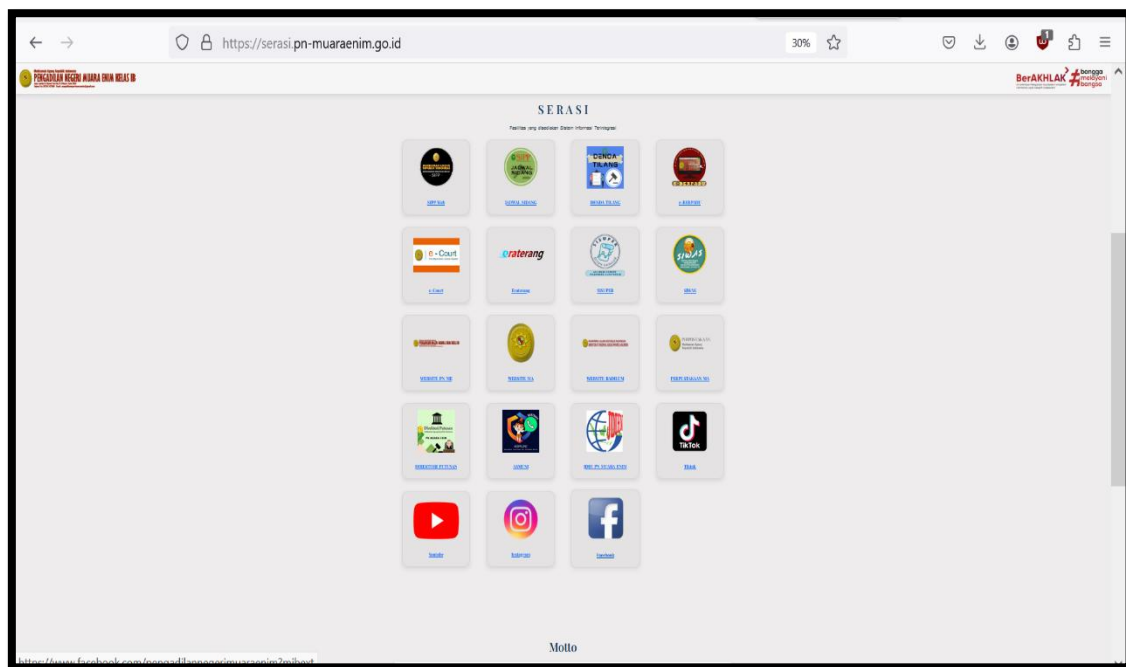
4. Aplikasi SERASI (SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI) Layanan informasi secara cepat dan terintegrasi dalam satu halaman web

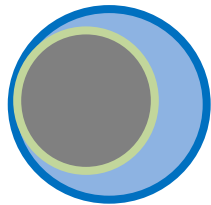
Aplikasi “SERASI” : “Sistem Informasi Terintegrasi” merupakan aplikasi yang dirancang dengan tujuan mempermudah masyarakat dan pencari keadilan untuk mengakses layanan Pengadilan Negeri Muara Enim serta mendapatkan informasi secara cepat dan terintegrasi dengan fitur-fitur yang terdapat dalam satu halaman web. Aplikasi bisa dibuka dengan mengetik alamat pada browser : <https://serasi.pn-muaraenim.go.id/>





Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2024





BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya.

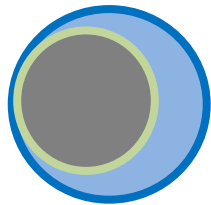
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi pengadilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

Adapun fungsi pengawasan meliputi :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah

Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2) pengawasan yaitu pengawasan melekat, dan pengawasan rutin.





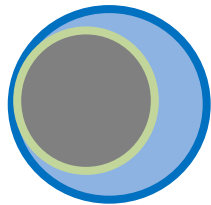
- **Pengawasan melekat**

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan membuat laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana, hukum dan perdata dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala, dan perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan. Panitera juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan penyelesaian perkara, adminitrasi kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. Sekretaris juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan.

Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para hakim maupun pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2019 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2019 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pengawasan melekat juga dilaksanakan kepada para honorer di pengadilan Negeri Muara Enim dengan menilai kinerja honorer setiap bulannya



oleh tim penilai yang di tunjuk Ketua pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Surat keputusan dan dituangkan dalam bentuk lembar evaluasi setiap bulannya. Dan di akhir tahun kinerja para honorer di evaluasi apakah layak untuk di perpanjang atau tidak.

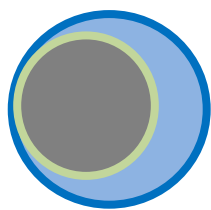
- **Pengawasan rutin**

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Muara Enim secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

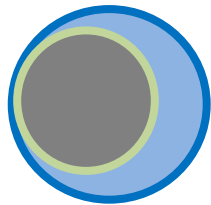
- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
 - administrasi persidangan
 - administrasi perkara
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup:
 - administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi informasi
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pengawasan rutin ini, ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan SK Nomor: 1955/KPN.W6-U6/SK/PW1/XI/2025 tentang penunjukan Hakim pengawas bidang dimana ditunjuk hakim yang bertugas sebagai pengawas setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun laporan setiap hakim pengawas bidang tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai koordinator pengawasan.





No	Nama	Jabatan	Pengawasan Bidang
1.	Miryanto, S.H., M.H	Hakim	Koordinator Pengawasan
2.	Yuri Alpha Fawnia, S.H	Hakim	Kepaiteraan Perdata
3.	Muhammad Ridwan, S.H	Hakim	Kepaiteraan Pidana
4.	Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H	Hakim	Kepaiteraan Hukum
5.	Galih Prayudo, S.H., M.H	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
6.	Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H	Hakim	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
7.	Dwi Lestari, S.H	Hakim	Sub Bagian PTIP
8.	Miryanto, S.H., M.H	Hakim	Pengawas dan Pengamat
9.	Anisa Lestari, S.H., M.Kn	Hakim	Pembina Pengawas/ Penelaah Eksekusi
10.	Anisa Lestari, S.H., M.Kn	Hakim	Pembina Inovasi/ Media Sosial/ E-Banner
11.	Shunita Laxmi Dewi, S.H	Hakim	Pengawas/ Koordinator AMPUH
12.	EVA RACHMAWATY, S.H., M.H	Hakim	Pengawas/ Koordinator Zona Integritas
13.	MGS Akhmad Rafiq Ghazali	Hakim	Pengawas/ Penanggung Jawab PTSP
14.	Frans Lukas Sianipar, S.H., M.H	Hakim	Ketua Satgas SIPP/MIS/EIS
15.	Shelly Noveriyati, S.H	Hakim	Koordinator Seni/ Olahraga
16.	Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H	Hakim	Koordinator Rohani/ Keagamaan



Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan membina diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala (rapat bulanan) oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.

B. Evaluasi

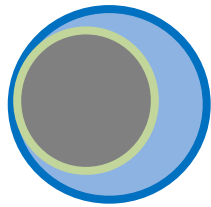
Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan rutin harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi dan absensi jika pengawasan dalam bentuk rapat.

Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-temuan di lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas kekurangan yang ditemui.

Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri Muara Enim adalah dengan mengadakan audit internal yang dilakukan oleh tim audit internal pada setiap bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi hasil dari audit internal.

Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan. Dilakukannya pembetulan, penyempurnaan, perbaikan dalam pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan. Sehingga didapat kepuasan atas kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan demi terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.





BAB VII

PENUTUP

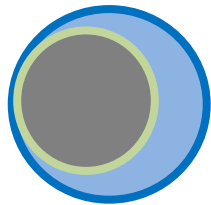
A. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 ini memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan penyelesaian perkara, sarana prasarana, pengelolaan keuangan.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim telah berjalan baik. Penyempurnaan terhadap kualitas pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan akan tetap dilakukan untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung”*





B. Rekomendasi

1. Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Muara Enim kiranya dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap tahun meningkat dan terdapatnya beberapa pegawai yang merangkap tugas disamping tugas utamanya.
2. Perlunya penambahan anggaran belanja modal untuk sarana dan prasarana serta pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Muara Enim sesuai dengan prototype.
3. Mahkamah Agung dapat mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti pengolaan arsip perkara, bimtek e-court, bimtek SIPP, bimtek pembuatan Berita Acara Perkara, pedoman Layanan hukum dan penanganan pengaduan, serta bimtek Lainnya yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara.



PRESTASI DAN PENGHARGAAN

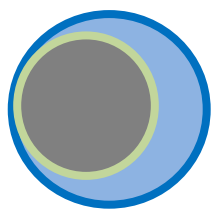
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB TAHUN 2025

- Pengadilan Negeri Muara Enim Meraih Penghargaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan Predikat UNGGUL oleh Badan Peradilan Umum



- Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Bapak Ari Qurniawan, S.H., M.H Meraih Penghargaan Role Model Pimpinan Oleh Badan Peradilan Umum





- Pengadilan Negeri Muara Enim Meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Kategori Lembaga Yudikatif Kab/Kota Provinsi Sumatera selatan oleh komisi informasi provinsi sumatera selatan Dengan nilai 95.87 kategori informatif.

7. KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF KAB/KOTA PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Pengadilan Agama Kayu Agung	96,02	Informatif
2	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	96,02	Informatif
3	Pengadilan Negeri Muara Enim	95,87	Informatif
4	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	95,39	Informatif
5	Pengadilan Agama Sekayu	94,53	Informatif
6	Pengadilan Agama Muara Enim	94,49	Informatif
7	Pengadilan Negeri Prabumulih	94,33	Informatif
8	Pengadilan Agama Lahat	92,61	Informatif
9	Pengadilan Negeri Kayu Agung	92,57	Informatif
10	Pengadilan Agama Palembang	26,59	Tidak Informatif
11	Pengadilan Agama Prabumulih	22,78	Tidak Informatif
12	Pengadilan Negeri Baturaja	16,48	Tidak Informatif
13	Pengadilan Negeri Palembang	10	Tidak Informatif
14	Pengadilan Negeri Sekayu	10	Tidak Informatif
15	Pengadilan Negeri Lahat	10	Tidak Informatif
16	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	10	Tidak Informatif
17	Pengadilan Negeri Pagaram	10	Tidak Informatif
18	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	10	Tidak Informatif
19	Pengadilan Agama Muaradua	10	Tidak Informatif

